

## KONSEP EKONOMI DALAM PERSPEKTIF BUDDHIS

**Haudi**

STAB Dharma Widya

[haudi@stabdharma Widya.ac.id](mailto:haudi@stabdharma Widya.ac.id)

**Rudy**

STIAB Smaratungga

[smaratungga@gmail.com](mailto:smaratungga@gmail.com)

**Grace**

STIAB Smaratungga

[smaratungga@gmail.com](mailto:smaratungga@gmail.com)

### Abstrak

Pola hidup konsumtif dan materialistik tidak sesuai dengan ajaran Buddha untuk hidup bersahaja dan apa adanya untuk kebahagiaan semua makhluk. Walaupun Buddha tidak pernah mengajarkan ilmu ekonomi, Schumacher menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi agama Buddha itu pasti ada karena mata pencaharian atau penghidupan yang benar adalah salah satu dari delapan unsur Jalan Mulia di dalam agama Buddha. Artikel ini bertujuan agar umat Buddha dalam menjalankan mata pencahariannya mengimplementasikan ekonomi Buddhis dalam rangka mewujudkan masyarakat Buddhis *hitta sukhaya* untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan akhir umat Buddha, yaitu *nibbana*. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui studi pustaka/kajian literatur. Nilai-nilai Buddhisme memberikan pedoman bagaimana sebaiknya kaum perumah tangga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan prinsip moralitas, bagaimana sebagian kekayaan yang diperolehnya disimpan, sebagian digunakan untuk investasi, dan sebagian untuk cadangan yang digunakan pada saat mengalami masa sulit.

**Kata Kunci :** Konsep Ekonomi, Perspektif Buddhis

### PENDAHULUAN

Agama Buddha memberikan dua pilihan hidup, yaitu menjadi seorang perumah tangga atau seorang samana. Jika pilihannya sebagai seorang perumah tangga, sudah pasti tidak akan terlepas dari masalah ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis yang liberal dari dunia Barat mendominasi dan berkembang ke hampir seluruh lapisan masyarakat menyebabkan berkembangnya pola hidup konsumtif dan cara pandang materialistik. Pola hidup konsumtif

dan materialistik ini tidak sesuai dengan ajaran Buddha untuk hidup sederhana, bersahaja dan apa adanya untuk kebahagiaan semua makhluk. Paradigma ekonomi Buddha dan Barat tidak selalu harus dipertentangkan karena masing-masing mengusulkan langkah dan jalan berbeda untuk membantu umat manusia menjadi lebih bahagia. Sementara umat Buddha fokus pada atribut mental/spiritual, ekonomi barat menekankan pada benda yang berwujud. Studi ilmiah semakin menegaskan banyak manfaat dari praktik Buddha tentang altruisme, perhatian, dan etika yang harus dimulai dari *personal level* untuk mencapai keseimbangan (Shi, 2018).

Sebuah penelitian di China berpendapat bahwa penduduk Shanghai terus mempraktikkan agama Buddha meskipun penyebaran ikonoklasme dan seruan berulang untuk mengakhiri semua praktik boros yang terkait dengan agama Tiongkok dilakukan oleh kaum elit penguasa (Tarocco, 2019).

Buddha tidak pernah mengajarkan ilmu ekonomi, akan tetapi Schumacher menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi agama Buddha itu pasti ada karena mata pencaharian atau penghidupan yang benar adalah salah satu dari delapan unsur Jalan Mulia di dalam agama Buddha (Wijaya-Mukti, 2003). Schumacher membandingkan ekonomi Buddhis yang mempromosikan kepuasan kebutuhan melalui konsumsi minimum dengan ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada perluasan konsumsi. Dia menyarankan bahwa produksi lokal untuk kebutuhan lokal cenderung tidak menimbulkan persaingan yang sengit untuk sumber daya daripada produksi skala besar. Menurut Schumacher, seorang ekonom Buddhis, akan menekankan penanaman pohon. Oleh karena modernisasi dan pengejaran kekayaan materi mengarah pada ketidakbahagiaan, ada kebutuhan akan Jalan Tengah, yaitu mata pencaharian benar berdasarkan metode yang lebih sederhana dan tidak terlalu kejam (Leonard, 2019).

Dalam agama Buddha, *sila* terdiri dari tiga unsur, yaitu: ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Seorang perumah tangga Buddhis dalam aktivitas sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan. Agama Buddha tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Oleh karena itu, mendapatkan kekayaan merupakan hal yang wajar dilakukan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Buddha mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan sebaiknya sesuai dengan jalan *dhamma* yang artinya kekayaan diperoleh tidak dengan cara eksploitasi, tetapi melalui usaha sungguh-sungguh dan keterampilan, dan seharusnya diperoleh dengan usaha yg bermoral. Tolak ukur suatu mata pencaharian dikatakan baik adalah jika mata pencaharian yang dilakukan menimbulkan manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk orang lain ataupun manfaat untuk keduanya.

Idealnya, kekayaan yang diperoleh dari bekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, sebagian untuk disimpan, sebagian untuk investasi dan pengembangan usaha, dan sebagian lagi untuk cadangan yang dapat digunakan pada saat mengalami kesulitan (Mulyana, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui studi pustaka/kajian literatur. Penulis mengkaji berbagai literatur berupa buku, jurnal-jurnal, dan artikel *online* lainnya sebagai sumber referensi. Langkah-langkah penulisan artikel ini adalah pertama-tama penulis menetapkan terlebih dahulu tema yang akan dibahas dalam artikel ini dari berbagai kajian yang telah didiskusikan dalam kuliah *online* mata kuliah Pendidikan Kemasyarakatan Buddhis, lalu penulis mencari sumber-sumber literatur yang terkait dengan tema yang akan dibahas. Penulis melakukan kajian literatur secara *online* untuk mencari jurnal-jurnal terkait, serta buku dan artikel online lainnya sebagai sumber referensi dalam penulisan artikel ini. Kemudian penulis mengorganisasikan semua literatur yang telah dikumpulkan dalam sebuah *folder* di Mendeley untuk nanti diambil referensinya di dalam artikel ini.

## **HASIL PENELITIAN**

Agama Buddha memiliki semangat untuk menyejahterakan hidup semua makhluk juga dalam hal menjalankan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam artikel ini akan ditelaah mengenai apa yang dimaksud dengan konsep ekonomi secara umum dan bagaimana bentuk dari konsep ekonomi Buddhis untuk mendapatkan gambaran tentang konsep ekonomi dalam perspektif Buddhis. Ekonomi Buddhis berbeda secara signifikan dari ekonomi neoklasik dalam pengakuannya terhadap masalah etika dan moral, ilmu ekonomi Buddhis juga mengakui bahwa banyak faktor non-keuangan yang berkontribusi pada kualitas hidup seseorang adalah penting. Faktor kunci keberhasilan dalam usaha komunitas yang dipelajari adalah proses 'pemikiran yang baik', atau penggunaan kebijaksanaan yang konstruktif di antara para pemimpin dan anggota kelompok melalui proses 'pemahaman yang benar' dan 'pemikiran yang benar'. Tidak ada faktor yang dapat diciptakan dari modal fisik tetapi berasal dari proses pembelajaran dan peninjauan (Prayukvong, 2005).

### **Konsep Ekonomi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal perindustrian, dan perdagangan (KBBI, 2016). Di dalam ekonomi terdapat tiga sumber masalah, yaitu kelangkaan sumber daya, pilihan dalam menghadapi kelangkaan tersebut, dan biaya atau pengorbanan yang timbul karena pilihan yang diambil.

Prinsip ekonomi pada dasarnya adalah memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, dan meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi berlaku dalam tiga kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

### **Konsep Ekonomi Buddhis**

Ekonomi Buddhis tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai etika dari suatu kegiatan ekonomi, tetapi berjuang untuk memahami realitas dan mengarahkan kegiatan ekonomi pada keharmonisan dengan "hal seperti apa adanya". Hal ini mengharuskan mata pencaharian seseorang tidak menciptakan penderitaan atau menyakiti diri mereka sendiri maupun orang lain. Kunci dari ekonomi Buddhis yaitu kesederhanaan, ekologi dan tanpa kekerasan. Tujuan kehidupan ekonomi dari sudut pandang ekonomi Buddhis yaitu untuk memperoleh kesejahteraan yang maksimal tanpa merugikan makhluk lain. Dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa nilai inti ekonomi Buddhis adalah welas asih dan kolaborasi melalui kesejahteraan dicapai yang mengarah ke kebijaksanaan yang lebih tinggi (*pañña*) (Prayukvong, Huttasin, & Foster, 2015).

Ilmu ekonomi Buddhis mengemukakan bahwa *pañña* atau kemampuan untuk memahami segala sesuatu dalam sifatnya sendiri adalah corak produksi sedangkan *sukha* adalah hasil dari munculnya *pañña*. Orang-orang yang memiliki *pañña* memahami segala sesuatu dalam sifatnya sendiri dan memahami bahwa *sukha* yang lebih tinggi adalah dari kedamaian dan ketenangan yang pada akhirnya akan menuntun pada emansipasi penuh atau kebebasan yang dikenal sebagai *vimuttisukha*. Bertentangan dengan ajaran ekonomi arus utama atau ekonomi konvensional bahwa tingkat utilitas yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan memiliki lebih banyak kekayaan dan karenanya lebih banyak sumber daya digunakan. Tingkat *sukha* yang lebih tinggi dalam ekonomi Buddhis hanya dapat diperoleh dari *pañña* yang tidak memerlukan konsumsi atau sumber daya tambahan sehingga ekonomi Buddhis dapat dikatakan sebagai ekonomi yang paling efisien dalam hal sumber daya yang digunakan. Ekonomi Buddhis menganjurkan pembangunan berkelanjutan, terutama di dunia yang saat ini berada di ambang bencana pemanasan global akibat inefisiensi dalam konsumsi, konsep yang tidak dapat dipahami dengan jelas dalam ekonomi arus utama. Bagian tersulit dalam ekonomi Buddhis adalah bagaimana menanamkan *pañña* pada sebanyak mungkin orang (Puntasen, 2007).

Buddha mengajarkan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan saat berhadapan dengan kekayaan yang kita miliki, yaitu: (1) cara memperoleh kekayaan tidak membawa penderitaan dan kerugian bagi makhluk lain; (2) cara menggunakan kekayaan yang benar; dan (3) sikap mental terhadap kekayaan itu sendiri.

Buddha menyatakan bahwa keberhasilan usaha minimal tergantung pada empat faktor utama sebagai berikut: (a) *Utthanasampada*, artinya bekerja dengan rajin dan bersemangat, memperoleh kekayaan melalui usaha dan kesungguhan hati yang berlandaskan keterampilan; (b) *Arakha Sampada*, artinya menjaga dan memelihara kesuksesan yang telah diperoleh dengan hati-hati termasuk menjaga sistem yang digunakan serta berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi; (c) *Kalyana-mitta*, yaitu memiliki sahabat yang baik, jujur, pandai terpelajar, mulia, dan penolong, akan berpengaruh besar untuk kemajuan usaha kita; (d) *Samma Jivikata*, artinya hidup sesuai dengan penghasilan, tidak boros tapi juga tidak kikir. Agama

Buddha memandang materi bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, juga bukan sesuatu yang harus kita dewakan. Terhadap materi hendaknya kita bersikap netral serta menggunakannya sewajarnya sesuai kebutuhan.

Penerapan ekonomi Buddhis dalam kasus di Indonesia dapat dilihat pada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang telah mengesahkan teori pembangunan dan pemerintahan yang mirip dengan Sufficient Economy (SE) di Thailand dan Gross National Happiness (GNH) di Bhutan dalam beberapa hal, dengan fokus pada politik dan administrasi. Dinamakan sesuai dengan konsep tradisional Jawa, “Penyatuan Raja dan Rakyat”, yang terakhir ia perinci dalam pidatonya saat menerima gelar doktor kehormatan Australia (2015), sehingga penyampaiannya dalam bahasa Inggris. Penyatuan Raja dan Rakyat lebih spesifik dan dioperasionalkan daripada teks SE atau GNH asli, dan sebagai Gubernur, Sri Sultan juga memiliki mandat, dan kapasitas, untuk melaksanakannya, tetapi sejauh ini sebagian besar luput dari perhatian ilmiah internasional, apalagi mengacu pada Ekonomi Buddha (Drechsler, 2019).

Pengaturan tentang kekayaan yang telah kita dapat, dapat dilihat di dalam *Sigalovada Sutta* dalam kitab *Digha Nikaya* sebagai berikut: (1) *ekena bhoge bhujjeyya* (satu bagian untuk dinikmati); (2) *dvihi kammam payojaye* (dua bagian untuk ditanamkan kembali ke dalam modalnya); (3) *catutabca nidhapeyya* (bagian keempat disimpan); dan (4) *apadasu bhavissanti* (untuk menghadapi masa depan yang sulit) (D.III.188). Buddha juga menjabarkan tentang enam cara pemborosan kekayaan yang harus dihindari oleh umat Buddha, yaitu: (1) kecanduan pada minuman keras dan obat-obatan; (2) berkeliaran pada waktu yang tidak pantas; (3) menghadiri hiburan malam; (4) ketagihan berjudi; (5) dikelilingi orang yang tidak baik; dan (6) kebiasaan bermalas-malasan.

Karakter utama dari ekonomi Buddhis adalah mengacu pada jalan tengah, hidup sederhana dan bersahaja, tidak berlebihan, mengetahui dan sadar dimana kebahagiaan bertemu kepuasan. Jadi setelah kita menjawab kebutuhan akan kualitas kehidupan atau kebahagiaan, kita merasa cukup. Misalnya konsumsi yang disesuaikan dengan jalan tengah harus seimbang sebatas jumlah yang pantas untuk pencapaian kesejahteraan bukan untuk pemenuhan nafsu keinginan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi klasik bahwa konsumsi maksimum akan membawa kepuasan maksimum. Sebaiknya kita memiliki konsumsi yang bijak secukupnya yang akan menuntun menuju kebahagiaan.

Di dalam ekonomi Buddhis juga tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain yang merupakan prinsip penting yang digunakan sebagai kriteria dasar perbuatan manusia. Ekonomi Buddhis harus sesuai dan harmonis dengan keseluruhan proses sebab akibat sehingga ekonomi berjalan sedemikian rupa tanpa menyakiti diri sendiri maupun makhluk lain. Walaupun konsumsi dan kekayaan ekonomi penting, tetapi itu bukanlah tujuan akhir, melainkan hanyalah sebagai dasar untuk perkembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Ekonomi Buddhis memastikan pembentukan kekayaan menuntun pada kehidupan dimana orang-orang bisa mengembangkan potensi terbaik diri mereka dan memperbanyak melakukan hal-hal yang baik.

Kualitas kehidupanlah dan bukan harta yang menjadi tujuan. Dalam sebuah *paper* dikatakan bahwa ekonomi Buddhis sangat konsisten dengan perubahan saat ini yang lebih melihat secara jangka panjang keharmonisan manusia dengan lingkungan alam (Daniels, 2003).

## **KESIMPULAN**

Nilai-nilai Buddhisme memberi pedoman bagaimana sebaiknya kaum perumah tangga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan prinsip moralitas, bagaimana sebagian kekayaan yang diperolehnya disinpan, sebagian digunakan untuk investasi, dan sebagian untuk cadangan yang digunakan pada saat mengalami masa sulit. Ilmu ekonomi Buddhis mengusulkan prinsip-prinsip alternatif seperti meminimalkan penderitaan, menyederhanakan keinginan, tanpa kekerasan, perhatian yang tulus, dan kemurahan hati dimana ekonomi Buddhis bukanlah sebuah sistem tetapi strategi yang dapat diterapkan di lingkungan ekonomi mana pun (Zsolnai, 2007).

Artikel ini bertujuan agar umat Buddha dalam menjalankan mata pencahariannya mengimplementasikan ekonomi Buddhis dalam rangka mewujudkan masyarakat Buddhis *hitta sukhaya* untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan akhir umat Buddha, yaitu *nibbana*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daniels, P. L. (2003). Buddhist Economics and The Environment: Material Flow Analysis and The Moderation of Society's Metabolism. *International Journal of Social Economics*, 30(1–2), 8–33. <https://doi.org/10.1108/03068290310453592>
- Drechsler, W. (2019). The Reality and Diversity of Buddhist Economics (With Case Studies of Thailand, Bhutan and Yogyakarta). *American Journal of Economics and Sociology*, 78(2), 524–560.
- Dharma, B., Wijoyo, H., & Anjayani, N. S. (2020). Pengaruh Pendidikan Sekolah Minggu Buddha terhadap Perkembangan Fisik-Motorik Peserta Didik Kelas Sati di Sariputta Buddhist Studies. *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha*, 2(2), 71-82.
- Fransisca, A., & Wijoyo, H. (2020). Implementasi Metta Sutta terhadap Metode Pembelajaran di Kelas Virya Sekolah Minggu Sariputta Buddhies. *Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Buddha*, 2(1), 1-12.
- Haudi, H. W., & Cahyono, Y. (2020). Analysis of Most Influential Factors to Attract Foreign Direct Investment. *Journal of Critical Reviews*, 7(13), 4128-4135.
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved January 8, 2021, from KBBI website: <https://kbbi.web.id/toleran>

- Leonard, R. (2019). E. F. Schumacher and The Making of “Buddhist Economics,” 1950 - 1973. *Journal of the History of Economic Thought*, 41(2), 159–186. <https://doi.org/10.1017/S1053837218000731>
- Mulyana, M. (2019). *Manajemen Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Buddhis*. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/vqndw>
- Nikaya, D. (2009). *Digha Nikāya Khotbah-khotbah Panjang Sang Buddha*. 2009. Jakarta: Dhamma Citta Press.
- Pranata, J., & Wijoyo, H. (2020, November). ANALISIS UPAYA MENGEMBANGKAN KURIKULUM SEKOLAH MINGGU BUDDHA (SMB) TAMAN LUMBINI TEBANGO LOMBOK UTARA. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 2, pp. 778-786).
- Pranata, J., & Wijoyo, H. (2020). Meditasi Cinta Kasih untuk Mengembangkan Kepedulian dan Percaya Diri. *Jurnal Maitreyawira*, 1(2), 8–14.
- Pranata, J., Wijoyo, H., & Suharyanto, A. (2021). Local Wisdom Values in the Pujawali Tradition. 4, 590–596. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1642>
- Prayukvong, W. (2005). A Buddhist economic approach to the development of community enterprises: A case study from Southern Thailand. *Cambridge Journal of Economics*, 29(6), 1171–1185. <https://doi.org/10.1093/cje/bei071>
- Prayukvong, W., Huttasin, N., & Foster, M. J. (2015). Buddhist economics meets agritourism on the thai farm. *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research*, 9(2), 183–199. <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-08-2014-0065>
- Puntasen, A. (2007). Why Buddhist Economics is Needed as a New Paradigm for a Better Understanding of Happiness (Wellness). *International Conference on Happiness and Public Policy, Bangkok*, (July), 18–19.
- Setyawati, E., Wijoyo, H., & Soeharmoko, N. (2020). RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (RDBMS). Pena Persada.
- Shi, J. (2018). *Buddhist Economics: A Cultural Alternative*. (February), 417–436. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-6478-4\\_23](https://doi.org/10.1007/978-981-10-6478-4_23)
- Sunarsi, D., Wijoyo, H., & Al Choir, F. (2020, October). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN ONLINE DALAM MASA PANDEMIK COVID 19. In *Prosiding Seminar Nasional LP3M* (Vol. 2).
- Tarocco, F. (2019). The Buddhist Economies of Modern Urban China. *Hualin International Journal of Buddhist Studies*, 2(2), 250–272. <https://doi.org/10.15239/hijbs.02.02.09>
- Wijaya-Mukti, K. (2003). *Wacana Buddha-Dharma*.
- Wijoyo, H., & Nyanasuryanadi, P. (2020). Etika Wirausaha Dalam Agama Buddha. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, 11(2).

- Wijoyo, H., Santamoko, R., Muliensyah, D., Yonata, H., & Handoko, A. L. (2020). The Development of Affective Learning Model to Improve Student's Emotional Quotient. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 9292-9297.
- Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). Model pembelajaran menyongsong new era normal pada lembaga PAUD di Riau. *JS (Jurnal Sekolah)*, 4(3), 205-212.
- Wijoyo, H., Indrawan, I., Yonata, H., & Handoko, A. L. (2020). *Panduan Pembelajaran New Normal Dan Transformasi Digital*.
- Wijoyo, H., Limakrisna, N., & Suryanti, S. (2021). The effect of renewal privacy policy whatsapp to customer behavior. *Insight Management Journal*, 1(2), 26-31. Retrieved from <http://journals.insightpub.org/index.php/imj/article/view/22>
- Wijoyo, H. (2021). PERSEPSI MAHASISWA TENTANG APLIKASI CHATTING SIGNAL. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 153-156.
- Wijoyo, H. (2019). Manfaat Etika dalam Berwirausaha menurut Pandangan Buddhis. *Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Buddha*, 1(1), 45-54.
- Yahya, M., & Wijoyo, H. (2020). Developing School Information Program: Integrated Management System based on Character Value at SMP Negeri 9 Tapung. *International Journal of Asian Education*, 1(3), 179-186.
- Zsolnai, L. (2007). Western Economics Versus Buddhist Economics. *Society and Economy*, 29(2), 145–153. <https://doi.org/10.1556/SocEc.29.2007.2.2>